

KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS KEKERASAN ANAK MELALUI PROGRAM BKB (BINA KELUARGA BALITA) DI KABUPATEN BADUNG

Elsa Agrevina¹⁾, I Dewa Ayu Putri Wirantari²⁾, Putu Eka Purnamaningsih³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: elsa.agrevina@student.unud.ac.id¹⁾, putriwirantari@unud.ac.id²⁾,

ekapurnama@unud.ac.id³⁾

ABSTRAK

Violence is something that we often encounter in social life and what we most often encounter is violence that occurs in the family environment, especially acts of violence against children, both in the form of verbal violence and physical violence. In this case, Badung Regency has a work program that is planned to prevent and suppress the increasing number of cases of violence, namely the BKB (Toddler Family Development) Program carried out by the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection. The type of research that the writer uses is descriptive qualitative writing. In this study the authors used research indicators proposed by Agus Dwiyanto (2006:50-51), namely Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility, and Accountability.

Keywords: Performance, Office of P2KBP3A, Child Violence, Badung Regency

1. Pendahuluan

Kekerasan merupakan kasus yang sering kita temukan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, termasuk tindakan kekerasan terhadap anak baik dalam bentuk kekerasan verbal maupun kekerasan fisik.

Kekerasan anak merupakan masalah yang sangat serius dan memiliki dampak yang merugikan bagi perkembangan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan anak menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam upaya melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan berdaya bagi mereka.

Kabupaten Badung merupakan salah satu wilayah yang tidak luput dari kasus kekerasan. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki tingkat kasus kekerasan anak yang cukup tinggi, hal ini mengindikasikan perlunya upaya penanggulangan yang efektif dan komprehensif. Untuk mengatasi masalah ini, Kabupaten Badung telah mengambil langkah konkret dengan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan daerah ini menjadi landasan utama dalam upaya pencegahan kasus kekerasan anak di Kabupaten Badung, dengan mengatur bagaimana pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan.

Adapun data kasus KDRT yang terlapor adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data kasus terlapor ke Dinas P2KBP3A Kabupaten Badung

No	Jenis Kasus	Kasus 2019	Kasus 2020	Kasus 2021
1.	Kekerasan anak (usia 0-5 tahun)	2	3	6
2.	Kekerasan anak usia remaja	1	0	3
3.	Kekerasan perempuan	4	2	2
4.	Kekerasan seksual	1	2	2
5.	Pelecehan	3	2	4

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab. Badung

Adapun program yang dijalankan adalah Program Bina Keluarga Balita (BKB), yang diharapkan dapat mencegah dan menangani kasus kekerasan anak di

Kabupaten Badung. Program ini melibatkan peran serta masyarakat dan berbagai instansi terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak. Evaluasi kinerja Program BKB menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program ini dalam mencapai tujuannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti telah memberikan wawasan mengenai masalah kekerasan anak dan peran pemerintah dalam penanganannya. Namun, masih perlu adanya penelitian yang lebih khusus dalam mengevaluasi kinerja Program BKB di Kabupaten Badung. Evaluasi tersebut melibatkan analisis terhadap indikator kinerja yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan tersebut dengan melakukan evaluasi kinerja Program BKB dalam penanganan kasus kekerasan anak oleh Dinas P2KBP3A di Kabupaten Badung. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka yang komprehensif akan dilaksanakan untuk memenuhi pemahaman yang lebih terpadu mengenai program-program serupa dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberhasilan dan kekurangan program, serta rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, Dinas P2KBP3A Kabupaten Badung dapat meningkatkan efektivitas mereka dalam menangani kasus kekerasan anak dan melindungi hak-hak anak dengan lebih baik.

2. Metode Penelitian

Riset ini ialah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pada riset ini, penulis berupaya guna menggambarkan sebuah fenomena sosial. Riset kualitatif deskriptif tersebut menafsirkan perihal suatu kondisi yang berlangsung, perbedaan fakta-fakta, serta relasi dan pengaruh terhadap sebuah situasi. Penulis mengambil permasalahan perihal kekerasan anak yang ada di Kabupaten Badung beserta penanggannya. Dalam sudut pandang riset kualitatif, fenomena tersebut bersifat holistic yang memiliki arti tak dapat dipisahkan, alhasil penulis kualitatif mesti meninjau dalam kondisi sosial dengan cara keseluruhan. (Moleong,2014:6). Metode kualitatif ini memberikan data-data secara terperinci serta sama dengan apa yang sebenarnya terjadi. Metode riset deskriptif tertuju dalam penyelesaian permasalahan yang berlangsung di masa kini sebagai kunci pada apa yang telah diriset (Moleong,2014:11).

Metode riset kualitatif deskriptif semacam pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, serta diakhiri dengan suatu kesimpulan. Riset ini dilakukan tak semata-mata hanya untuk memberikan penjelasan dengan cara yang menyeluruh terkait permasalahan yang hendak diteliti serta di amati, tetapi bisa menjawab permasalahan dan mengolah hasil penelitian dengan melakukan Analisa.

Penulis harus mendapatkan data secara langsung tanpa perantara untuk menjaga keaslian dari data. Data primer ini dapat dilakukan dengan wawancara atau interview terhadap beberapa tenaga kerja di dinas terkait serta beberapa informan yang

dipercaya mampu memberikan informasi perihal masalah yang terdapat pada riset penulis dan mampu memaparkan permasalahan yang menjadi topik penelitian penulis. Sehingga dengan demikian maka ditemukan hasil analisis dari kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melalui program BKB (Bina Keluarga Balita) Terhadap Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Badung.

3. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Program BKB di Kabupaten Badung memiliki beberapa kelebihan, namun masih perlu ditingkatkan dalam beberapa aspek. Indikator produktivitas menunjukkan bahwa program telah berhasil dalam penanganan kasus kekerasan anak, tetapi belum mencapai target dalam angka kekerasan anak dan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi program. Indikator kualitas layanan menunjukkan bahwa program masih kurang optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia. Indikator responsivitas menunjukkan bahwa program telah memberikan respon terhadap permasalahan kekerasan anak di masyarakat, tetapi masih perlu peningkatan. Indikator tanggungjawab menunjukkan bahwa program berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Indikator akuntabilitas menunjukkan bahwa program telah melaporkan pertanggungjawaban dan menjaga transparansi keuangan.

1. Produktivitas Program Bina Keluarga Balita (BKB) Dalam mengevaluasi produktivitas Program BKB, perlu

diperhatikan sejauh mana program ini telah mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu target yang dapat digunakan sebagai indikator produktivitas adalah program kerja penanganan kasus kekerasan anak. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program ini telah mencapai target dengan baik, menunjukkan efektivitas dalam penanganan kasus kekerasan anak. Namun, terdapat target lain yang belum tercapai, seperti penurunan angka kekerasan anak dan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi program BKB.

2. Kualitas Layanan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Anak Evaluasi terhadap kualitas layanan dalam penanganan kasus kekerasan anak melalui Program BKB menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam sumber daya manusia sebagai penggerak program. Kurangnya jumlah dan kualitas tenaga kerja yang terlatih dalam penanganan kasus kekerasan anak dapat mempengaruhi efektivitas program ini. Diperlukan upaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program, termasuk melalui pelatihan dan peningkatan pemahaman tentang isu kekerasan anak.

3. Responsivitas Program Bina Keluarga Balita (BKB) Responsivitas Program BKB dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Badung dinilai cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan. Program ini telah memberikan tanggapan terhadap permasalahan kekerasan anak di

masyarakat dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya campur tangan dari dinas terkait. Namun, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan responsivitasnya dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seperti adanya pola kekerasan yang berkembang dan perubahan dalam dinamika sosial masyarakat.

4. Responsibilitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dalam pelaksanaan Program BKB, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menunjukkan responsibilitas yang baik. Dinas tetap bekerja sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku dalam setiap perjalanan program. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari dinas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penanganan kasus kekerasan anak.

5. Akuntabilitas Program Bina Keluarga Balita (BKB) Program BKB di Kabupaten Badung telah berjalan dengan baik dalam hal akuntabilitas. Dinas terkait telah menyajikan laporan pertanggungjawaban yang lengkap serta menerapkan transparansi keuangan selama program berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab dalam pengelolaan program dan penggunaan anggaran dengan tepat.

Dalam keseluruhan pembahasan, meskipun Program Bina Keluarga Balita di Kabupaten Badung telah menunjukkan beberapa keberhasilan dalam penanganan kasus kekerasan anak, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Program Bina Keluarga Balita (BKB) dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Badung, dapat disimpulkan bahwa program ini telah mencapai sebagian target yang ditetapkan, terutama dalam program kerja penanganan kasus kekerasan. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan guna mencapai efektivitas yang optimal.

Dalam hal produktivitas, program ini berhasil mencapai target dalam penanganan kasus kekerasan anak. Namun, terdapat target lain seperti penurunan angka kekerasan anak dan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi program BKB yang belum tercapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dan strategis untuk mencapai target-target tersebut.

Kualitas layanan dalam penanganan kasus kekerasan anak masih perlu ditingkatkan. Kendala utamanya adalah kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program. Diperlukan peningkatan jumlah dan pelatihan sumber daya manusia agar mereka mampu memberikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Responsivitas program terhadap permasalahan kekerasan anak dinilai cukup

baik, namun masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan pola kekerasan dan dinamika sosial masyarakat memerlukan responsivitas program yang lebih adaptif dan inovatif agar mampu mengatasi permasalahan secara efektif.

Dalam hal responsibilitas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan program BKB. Mereka telah bekerja sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku, yang menunjukkan adanya tanggung jawab dan keseriusan dalam penanganan kasus kekerasan anak.

Untuk meningkatkan efektivitas program ini, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan, penambahan jumlah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan responsivitas program terhadap perubahan sosial yang dinamis. Pemantauan dan evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan pencapaian target-target program serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan program secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Atik dan Ratmino. (2005). Manajemen Pelayanan Disertai Dengan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter Dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumber Jurnal dan Penelitian:

Akbar, Surya. 2018. Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan. JIAGANIS. 3 (2): 1-17

Sumber Artikel:

Ombudsman Republik Indonesia. 2017. Standar Pelayanan Publik. Diakses dari <https://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/197/SUBBL5a25a712a8fc9file20182019161742.pdf>, pada 31 Maret 2023

Sumber Peraturan Perundang- Undangan:

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan